



PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA DARMAWAN, S.Sos, M.Sc
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : HARDA KISWAYA
Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 122 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 1 Januari 2026

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,



INDRA DARMAWAN, S.Sos, M.Sc
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19681111 199503 1002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026

1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

PK Pejabat Eselon II – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan pemadam kebakaran				Angka kriminalitas -Crime rate	Per 100.000 penduduk	Kondusivitas menciptakan suasana yang tenang, teratur, dan nyaman, sehingga aktivitas atau proses yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.	Angka kejadian kriminalitas per 100.000 penduduk (crime rate)	-	-	-	119,75	1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan perangkat daerah	1.	Nilai AKIP perangkat daerah	Predikat/ angka	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Sleman				83,50 "A"	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1.	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan	Nilai	Survei kepuasan masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit	Angka hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan perangkat daerah				85,10		Program Penunjang urusan pemerintah daerah

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
					perangkat daerah		penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan							
		3.	Meningkatnya kualitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	1.	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan Perda, peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Persen	#Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sesuatu hal yang dapat mengganggu/menghambat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur# #Penegakan perda adalah penegakan terhadap perda yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan dilakukan oleh PPNS# #Peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dasar Kelinmasan bagi anggota Linmas#	Rata-rata realisasi kinerja persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan; Persentase anggota Linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas				83,33		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	1.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di WMK	Persen	Tingkat Waktu Tanggap adalah waktu yang ditempuh terhitung sejak diterimanya laporan kebakaran hingga sampai ke lokasi kejadian kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Wilayah WMK yang tertangani yang memenuhi target response time dibagi jumlah kasus kebakaran dalam WMK dikalikan 100%				100		Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp19.104.900.853,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp10.951.716.400,00	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2.894.708.310,00	
Jumlah (Rp)		Rp 32.951.325.563,00	

Sleman, 1 Januari 2026

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,



INDRA DARMAWAN, S.Sos, M.Sc
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19681111 199503 1002